LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN NEGERI PARIGI

TAHUN

2020

JL. SUNGAI PAKABATA , PARIGI, PARIGI MOUTONG – SULAWESI TENGAH

TELP/FAX (0451) 2320883,EMAIL : pn_parigi@yahoo.co.id

Website : www.pn-parigi.go.id

Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin serta ridho Nya Pengadilan Negeri Parigi telah dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disusun dengan memperhatikan uraian laporan Pelaksanaan Kegiatan dari bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta tugas para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsioanl dan Staff Yang ada pada sub Bagian masing – masing pada Pengadilan Negeri Parigi serta dengan memperhatikan pula Pedoman Standart Operasional Prosedur (SOP), Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan peraturan – peraturan hukum dan perundang – undang yang berlaku.

Berdarkan fakta – fakta laporan tiap bagian di kepaniteraan dan tiap sub di kesekretariatan, dengan itu dijadikan dasar sebagai pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dimana tiap detail kegiatan yang telah kita implementasikan dapat dilaporakan

Demikian, semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Negeri Parigi ini dapat Mencerminkan Kinerja Pengadilan Negeri Parigi dan Bermanfaat bagi Masyarakat,Amin ya Rabbal Alamin.

Parigi, 5 Januari 2021

Ketua

R.Hendy Nurcahyo Saputro,S.H.,M.Hum

Daftar Isi

Pengantar i

Daftar isi..... ii

BAB I Pendahuluan 1

BAB II A.Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Parigi 5

A.Keadaan Perkara Tahun 2020 5

B.Penyelesaian Perkara..... 5

B1.Jumlah Sisa Perkara yang diputus..... 5

B2.Jumlah Sisa Perkara yang diputus Tepat Waktu..... 6

B3.Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum 6

B4.Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi.....6

B5.Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi.....6

C.Akreditasi Penjamin Mutu.....7

C.1 Posbakum.....7

C.2 Sidang Keliling.....7

C.3 Perkara Prodeo.....9

BAB III Sumber Daya Manusia 10

A.Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/

Golongan/Pendidikan..... 10

B.Mutasi..... 11

C.Promosi..... 12

D.Pensiun..... 13

E.Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat.....13

BAB IV Pengelolaan Keuangan , Sarana dan Prasaranan

dan Teknologi Informasi.....15

A.Pengeloaan Keuangan.....15

B.Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....16

C.Pengelolaan Teknologi Informasi.....18

a.Implementasi E-Court.....18

b.Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.....18

BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....20

A.Akreditasi Penjamin Mutu.....20

B.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)..... 21

C.Innovasi Pelayanan Publik..... 22
BAB VI Pengawasan..... 24
A.Internal.....24
B.Evaluasi..... 26
BAB VII Penutup..... 27
A.Kesimpulan.....27
B.Rekomendasi..... 27

BAB I
PENDAHULUAN

A.KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan – perabaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelola anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manjemen organisasi yang jelas dan terukur
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposioanal.
5. Mengelola sarana dan prasaranan dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorintentasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manjemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas , dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi Infrormasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Negeri Parigi befokus pada pelayanan

publik, dan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya terutama yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan terdapat program prioritas, antara lain adalah :

1. **Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**
   a. Website Pengadilan Negeri Parigi

      Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 maka peda pengadilan Negeri Parigi juga telah membuat website PN parigi dengan alamat : www.pn-parigi.go.id diman website tersebut memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan secara aktual dan akurat.

   b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

      SIPP di Pengadilan Negeri Parigi juga telah disinkronisasikan dengan website Pengadilan Negeri Parigi, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat mengakses untuk mencari informasi perkara yang sedang berjalan secara langsung. Aplikasi SIPP tersebut dapat langsung diakses di www.sipp.pn-parigi.go.id

   c. E-Court Mahkamahh Agung

      E-Court Mahkamah Agung adalah suatu aplikasi dari Mahkamah Agung yang memungkinkan untuk mendaftarkan perkara hingga persidangan secara online. Keunggulan dari e-court adalah adanya fasilitas e-filling (pendafatarm secara online),e-paymenet (pembayaran perkara secara online), e-summon (pemanggilan secara online) dan e-litigasi (persidangan secara online).

2. **Program Penyelesaian Perkara**

   Pada tahun 2020 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parigi terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapinya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Parigi pada tahun 2020 Ketua Pengadilan Negeri Parigi mengeluarkan kebijakan yaitu :

   a. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan

b. Optimalisasi pelaksaaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam court calender
c. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
d. Mengimplementasikan administasi perkara secara elektronik (e-Court)
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP.

3. Pengawasan Rutin/Reguler

Pengadilan Negeri Parigi terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler, yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang Terhadap Bagian Kepaniteraan maupun Bagian Kesekretariatan yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek pada bagian-bagian oleh Hakim Pengaawas Bidang setiap bulan dan selanjutnya memberikan hasil pengawasan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawas. Selanjutnya laporan pengawasan di serahkan kepada Ketua Pengadilan sebagai bahan dalam rapat dinas bulanan yang rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi.

B.VISI dan MISI

VISI Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PARIGI YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Negeri Parigi juga sesuai dengan Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Parigi
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Parigi
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Parigi

C.RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas perlu adanya suatu perencanaan stategis di Pengadilan Negeri Parigi yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan

masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin komplek dan semakin tinggi kualitasnya. Sehingga terbentuk suatu manejemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ditetapkan ini adalah :

1. Terciptanya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,efektif dan berkeadilan
2. Terciptanya pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsioanal dalam APBN
3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manejemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Terciptanya menajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Tersedianya / terpenuhi sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil,transparan dan akuntabel.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A.KEADAAN PERKARA TAHUN 2020

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Banding	Kasasi	PK	Eksekusi	Grasi
1	Gugatan	4	66	53	17	3	0	0	1	0
2	Permohonan	1	15	16	0	0	0	0	0	0
3	Gugatan Sederhana	0	22	22	0	0	0	0	0	0
4	Pidana Biasa	46	252	260	38	13	3	0	0	0
5	Pidana Cepat	0	3	3	0	0	0	0	0	0
6	Perkara Lalu-Lintas	0	1720	1720	0	0	0	0	0	0
7	Pidana Anak	1	9	10	0	0	0	0	0	0
8	Pidana Praperadilan	0	1	1	0	0	0	0	0	0

B.PENYELESAIAN PERKARA

B1.Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Putus	Sisa Perkara
1	Gugatan	4	4	0
2	Permohonan	1	1	0
3	Gugatan Sederhana	0	0	0
4	Pidana Biasa	46	46	0
5	Pidana Cepat	0	0	0
6	Perkara Lalu-Lintas	0	0	0
7	Pidana Anak	1	1	0
8	Pidana Praperadilan	0	0	0

B2.Jumlah Sisa Perkara yang diputus tepat waktu

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	51
2	Permohonan	16
3	Gugatan Sederhana	22
4	Pidana Biasa	260
5	Pidana Cepat	3
6	Perkara Lalu-Lintas	1720
7	Pidana Anak	10
8	Pidana Praperadilan	1

B3.Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	64
2	Pidana Biasa	273
3	Pidana Anak	

B4.Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	0
2	Gugatan Sederhana	

B5.Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui diversi

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana Anak	0

C.AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

C.1. POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan salah satu layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan, sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bagi Masarakat tidak mampu di Pengadilan,Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan Posbakum dengan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.19.200.000 dan target Volume output sebesar 192 jam layanan. Dari anggaran tersebut, sampai dengan akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.19.200.000 (100%) dengan capaian volume output sebesa 192 jam layanan

Jumlah Pelayanan Posbakum Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Orang	Jam Layanan (Dalam Jam)	Ket
1	Januari	16	48	
2	Februari	22	66	
3	Maret	20	60	
4	April	6	18	
5	Mei	3	6	
6	Juni	0	0	
7	Juli	0	0	
8	Agustus	0	0	
9	September	0	0	
10	Oktober	0	0	
11	November	0	0	
12	Desember	0	0	
Total		**67**	**192**	

C.2. SIDANG KELILING

Sidang Keliling merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada msayarakat. Tujuan dilakukan sidang keliling adalah untuk menjangkau masyarakat pencari keadilan yang bertempat tinggal kauh dari Pengadilan Negeri sehingga dapat menghemat biaya dan

menghemat waktu agar tercipta peradilan yang sederhana , cepat dan berbiaya ringan

Sidang Keliling Pidana Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Total		**0**

Sidang Keliling Perdata Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Perkara
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Total		**0**

C.3. PERKARA PRODEO

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Perdata Permohonan	0
2	Perdata Gugatan	0

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN /GOLONGAN/PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020 adalah sebagaimana berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1	Hakim Karier	8
2	Pejabat Struktural	8
3	Panitera Pengganti	2
4	Jurusita	1
5	Jurusita Pengganti	2
6	Staff Pelaksana	2

SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Jabatan	Jumlah		Pendidikan					Ket
		L	P	S3	S2	S1	D3	SMA	
1	Ketua	1	0	0	1	0	0	0	
2	Wakil Ketua	1	0	0	0	1	0	0	
3	Hakim	6	2	0	2	6	0	0	
4	Pejabat Struktural	5	3	0	1	6	0	1	
5	Panitera Pengganti	1	1	0	1	1	0	0	
6	Jurusita	1	0	0	0	1	0	0	
7	Jurusita Pengganti	1	1	0	0	1	1	0	
8	Staff Pelaksana	2	0	0	0	2	0	0	
Jumlah									

SDM BERDASARKAN GOLONGAN DAN RUANG

No	Jabatan	Golongan Dan Ruang															
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Wakil Ketua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	Hakim	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
4	Pejabat Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-
5	Panitera Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
6	Jurusita	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8	Staff	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

A1.Mutasi

Mutasi Masuk

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Riwandi, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Donggala	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
2	Iin Fatimah, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Rembang	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
3	Tamran, S.H	Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala	Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi

Mutasi Masuk

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Effendy Kadengkang,SH	Hakim Pengadilan Negeri Parigi	Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo
2	Jayadi Husain,SH,MH	Hakim Pengadilan Negeri Parigi	Hakim Pengadilan Negeri Limboto
3	Melda I Kumangki,SE	Pengelola Kepegawian Pengadilan Negeri Parigi	Analis SDM Aparatur Pengadilan Negeri Gorontalo

4	Sunarto Mait,ST,MH	Sekretaris Pengadilan Negeri Parigi	Kabag Kepegawian dan Perencanaan
5	Sarina,S.Si	Bendahara Pengadilan Negeri Parigi	Analis SDM Aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
6	Yulisetyawan,SH,MH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Toli-Toli
7	Zulfikar Nurbarlian,SH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo
8	Grace Jane Rumawir,SH	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi	Bendahara Pengadilan Negeri Parigi

B.Promosi

Promosi Jabatan

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Ramadhana Heru Santoso, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
2	Riwandi, S.H	Cakim Pengadilan Negeri Donggala	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
3	Iin Fatimah, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
4	Venty Pratiwi, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Rembang	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
5	Angga Nugraha Agung, S.H	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Hakim Pengadilan Negeri Parigi
6	Maulana Shika Arjuna,SH	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Hakim Pengadilan Negeri Parigi

Promosi Pangkat

No	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru
1	R.Hendy Nurcahyo Saputro,S.H.,M.Hum	Ketua Pengadilan Negeri	IV/A	IV/B
2	Yuli Setyawan,SH,MH	Panitera Pengganti	III/C	III/D
3	Fenny Kalyana Cendana, SE.	Kasubag Bagian Umum Dan Keuangan	III/B	III/C

Pensiun

No	Nama	Jabatan
1	-	-

Diklat

No	Nama	Jabatan	Nama Diklat
1	Ramadhana Heru Santoso, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Diklat Cakim
2	Iin Fatimah, S.H.	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Diklat Cakim
3	Angga Nugraha Agung, S.H	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Diklat Cakim
4	Maulana Shika Arjuna,SH	Cakim Pengadilan Negeri Parigi	Diklat Cakim
5	Iin Fatimah, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Parigi	Transformasi Bisnis Proses Pengadilan

			(Online)
6	Visuddhatma Sankara,S.Kom	Pengelola Sistem dan Jariangan	Basic Image Editing With Adobe PhotoShop (Online)

BAB IV
Pengelolaan Keuangan ,Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

DIPA 01(Badan Urusan Administrasi)

1.Belanja Pegawai

- Pagu : 2.988.970.000
- Realisasi : 2.968.536.953
- Sisa : 20.433.047
- Prosentase : 99.32 %

2.Belanja Barang

- Pagu : 1.129.847.000
- Realisasi : 1.093.707.485
- Sisa : 36.139.515
- Prosentase :99.80 %

3.Belanja Modal

- Pagu : 3.564.300.000
- Realisasi : 3.564.131.932
- Sisa : 168.068
- Prosentase :99.9953 %

DIPA 03(Badan Peradilan Umum)

1.Penanganan Perkara

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Pagu : 83.520.000
- Realisasi : 76.308.500
- Sisa : 7.211.500
- Prosentase : 91.37%

Penerimaan Negera Bukan Pajak

PNBP DIPA 01

Diterima : - (tidak ada Penerimaan)

Disetorkan : -

Prosentase : -

PNBP DIPA 03

Diterima : 17.241.900

Disetorkan : 17.241.900

Prosentase : 100 %

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung Pengadilan Negeri Parigi Berlokasi di jalan sungai Pakabata Kec Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia

Data Aset Kendaraan Dina Bermotor Roda 4 (Empat)
Pengadilan Negeri Parigi

No	Pemakai	Merk Kendaraan	Plat Nomor
1	R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH., M.Hum	Kijang Innova Type G	DN 203 K
2	Dwi Sugianto, SH.	Avanza Type G	DN 1241 K

Data Aset Kendaraan Dina Bermotor Roda 2 (Empat)
Pengadilan Negeri Parigi

No	Pemakai	Merk Kendaraan	Plat Nomor
1	Rapiuddin, SH.,MH.	Honda Type GL 15	DN 4345 P

		B1DF	
2	Fenny Kalyana Cendana, SE.	Honda Type NF 125 TR	DN 4426 K

DAYA TAMPUNG RUANG SIDANG

DATA RUANG SIDANG DI PENGADILAN NEGERI PARIGI

No	Nama Ruang Sidang	Daya Tampung	Kondisi
1	Ruang Sidang Utama	60 Orang	Baik
2	Ruang Sidang Kedua	50 Orang	Baik
3	Ruang Sidang Anak	20 Orang	Baik

Komputer dan Internet

- **Jumlah Laptop =11 Unit**
- **Jumlah komputer =23 Unit**
- **Jumlah Server = 2 Unit**
- **Jumlah Printer =25 Unit**
- **Scanner = 3 Unit**
- **Internet Pengadilan Negeri Parigi menggunakan jaringan ICON + 15 Mbps Dedicated dan Indihome Upto 100 Mps**

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a.Implementasi E-Court

Pengadilan Negeri Parigi pada Tahun 2020 telah menyediakan ruang pojok e-Court untuk para pencari keadilan mendaftarkan gugaran,permohonan, gugatan sederhana dan bantahan memalui fasilitas yang telah disediakan berupa komputer sejumlah 1 unit



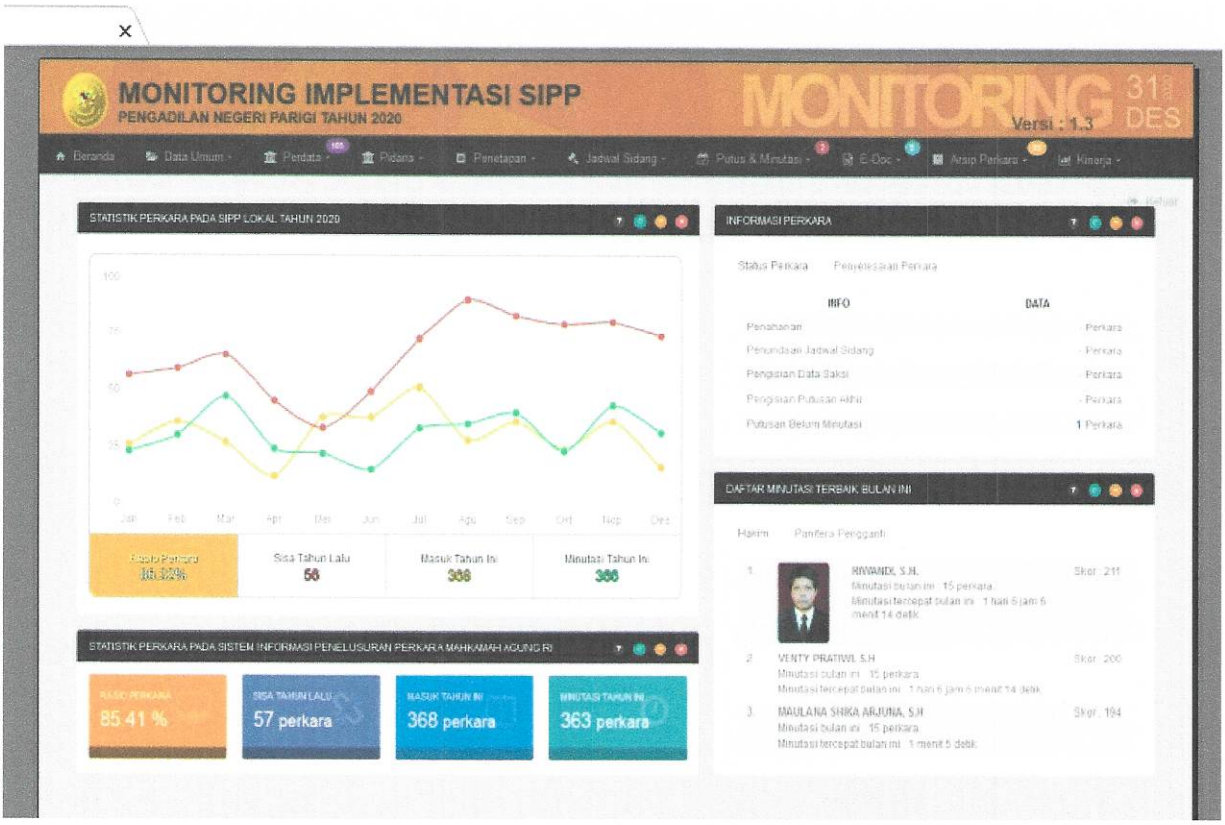
b.Implementasi SIPP

SIPP Pengadilan Negeri Parigi merupakan sarana pendukung administrasi perkara selalu melakukan update mengikuti versi terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan pada akhir Tahun 2020 SIPP yang telah terpasang di Pengadilan Negeri Parigi adalah 4.0.1

Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palu | Semua kategori | Periode: Januari 2020 s/d Desember 2020 | Cari

Copy PDF Print

NO	JML PERKARA	PENGADILAN NEGERI	KINERJA (Maks. 155.00)	KEPATUHAN (Maks. 533.00)	KELENGKAPAN (Maks. 146.00)	KESESUAIAN (Maks. 166.00)	TOTAL (Maks. 1000.00)
1	1~500	PENGADILAN NEGERI LUWUK	145.14	532.75	146.00	165.96	989.85 Poin
2	1~500	PENGADILAN NEGERI DONGGALA	144.95	521.82	131.34	165.54	963.65 Poin
3	501~1000	PENGADILAN NEGERI POSO	144.07	508.94	145.37	164.67	963.05 Poin
4	1~500	PENGADILAN NEGERI TOLI-TOLI	146.36	502.44	145.67	164.63	961.30 Poin
5	1~500	PENGADILAN NEGERI PARIGI	143.33	483.46	145.43	165.77	937.99 Poin
6	1~500	PENGADILAN NEGERI BUOL	149.13	488.04	131.10	164.95	933.22 Poin
7	1001~2000	PENGADILAN NEGERI PALU	139.45	471.29	130.78	162.14	903.66 Poin



BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A.AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Parigi telah memperoleh Akreditasi Penjaminan Mutu dari bandan peradilan Umum dengan nilai "A Excellent"



TAPM
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan Peradilan Umum

Nomor : TAPM. 196 / QMR / SERTIFIKAT / 11 / 2017

Diberikan kepada :

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Parigi Kelas II
Alamat : Jl. Sungai Pakabata, Parigi, Sulawesi Tengah
Terakreditasi : "A" (Excellent)

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun terhitung tanggal 20 November 2017 sampai dengan 20 November 2020, dengan rencana asesmen surveilan pada :

I. Mei 2018
II. November 2018
III. Mei 2019
IV. November 2019
V. Mei 2020
VI. November 2020

Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

WAHYUDIN

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Dr. HERRI SWANTORO

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, Khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Dimana program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah berlangusng sejak tahun 2018

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mulai dilaksanakan di Pengadilan Negeri Parigi. Seluruh pelayanan publik dilakukan pada area PTSP Pengadilan Negeri Parigi



Dimana di Pengadilan Negeri Parigi terdapat meja pelayanan sebagai berikut yaitu :

Loket 1 : Surat Masuk Sub Bagian Umum dan Keuangan

Meja umum melayani segala pelayanan publik yang menjadi tupoksi sub bagian umum dan keuangan. Pelayanan publik tersebut antara lain : pelayanan surat masuk, penerimaan tenaga magang/prakter kerja lapangan,dsb.

Loket 2 : Informasi, pengaduan dan Kepaniteraan Hukum

Selain melayani informasi dan pengaduan meja ini juga melayani pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Hukum. Antara lain : pembuatan surat keterangan,pendaftaran surat kuasa kuasa.

Loket 3 : Kepaniteraan Perdata

Meja perdata melayani pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan perdata. Pelayanan publik tersebut antara lain : pendaftaran perkara pedata permohonan, gugatam,dsb

Loket 4 : Kepaniteraan Pidana

Meja pidana melayani pelayanan publik yang menjadi tupoksi Kepaniteraan Pidana. Pelayanan publik tersebut antara lain : pendaftran perkara pidana,ijin besuk tahanan, dsb

C.INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Parigi Selama Tahun 2020 Melakukan Inovasi Pelayana Publik melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu

1.Asisten Virtual PTSP

Asisten Virtual PTSP adalah Petugas Virtual PTSP yang berbasis whatsapp. Asisten Virtual akan membalas secara otomatis segala permintaan informasi dan layanan di Pengadilan Negeri Parigi. Asisten Virtual PTSP Pengadilan Negeri Parigi bekerja 24 jam x 7 hari dalam 1 Minggu.

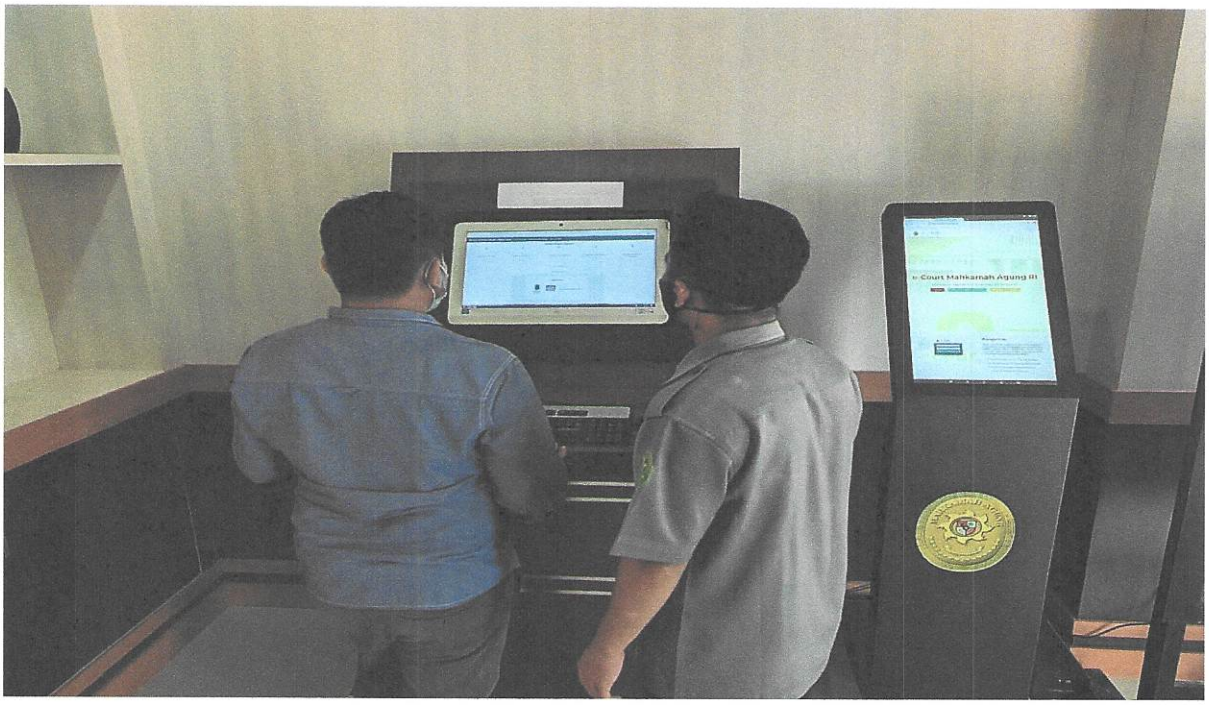


2.Survey Kepuasan Masyarakat

Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat berfungsi menjadi media bagi pengguna layanan pengadilan Negeri Parigi dalam memberikan penilian terdapat pelayanan yang telah didapatkan pada Pengadilan Negeri Parigi. Melalui inovasi ini diharapkan para pengguna layanan Pengadilan Negeri Parigi dapat lebih mudah, cepat , efisien dan transparant bagi masyarakat untuk memberikan penilaian dan mengetahui nilai hasil survei Kepuasan Mayarakat pada Pengadilan Negeri Parigi.



Inovasi survei kepuasan masyarakat ini dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses pada tablet yang disedikan di meja PTSP serta komputer Helpdesk yang ada pada Ruang PTSP



BAB V
PENGAWASAN

A.Internal

Pengadilan Negeri Parigi sebagai Satuan Kerja tingkat pertama Mahkamah Agung RI, sesuai dengan Sistem Organisasi Penyelenggara Pemerintahan diperlukan suatu pengawasan internal, sehingga ditunjuk Wakil Ketua sebagai Koordinator pengawas, dan Hakim sebagai pengawas internal pada bidang/bagian Pengadilan Negeri Parigi yaitu sebagai berikut :

1. Kepaniteraan :
    - Kepaniteraan Muda Perdata
        - Iin Fatimah, SH.
    - Kepaniteraan Muda Pidana
        - Ramadhana Heru Santoso,S.H
    - Kepaniteraan Muda Hukum
        - Venty Pratiwi,SH
2. Kesekretariatan :
    - SubBagian Keuangan dan Umum
        - Angga Nugraha Agung,SH
    - SubBagian Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana
        - Riwandi,SH
    - SubBagian Perencanaan,IT dan Pelaporan
        - Maulana Shika Arjuna,SH

Sesuai Buku 1 Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan,pembagian tugas Internal Meluputi :

1. Ketua , Melakukan pengawasan internal mengenai :
    a. Ketepatan waktu memulai persidangan
    b. Penyusunan court calender

c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan.
d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan
e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang
f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang
g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas
h. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti,selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua,Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan karyawan/ti yang dibuat secara berjenjang

2. Wakil ketua , melakukan pengawasan internal mengenai :
   a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dna realitasnya
   b. Pengisian register perkara secara tertip dan terus – menerus
   c. Penyampaian isi register oleh panitera muda sebagai bahan pembuatan laporan
   d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum
   e. Pelaksanan tugas jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus , sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak,pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainya , agar benar-benar sampai kepada yang berhak
   h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah anatara keuangan perkara dan keuangan APBN
   i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertip perkantoran

3. Hakim,melakukan pengawasan internal meliputi :
    a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata/ pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan.

B. Evaluasi

Evaluasi pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulan. Rapat rutin ini dihadari oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Parigi

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan laporan kajian hasil kerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020 di atas, disimpulkan :

1. Aparatur Pengadilan Negeri Parigi telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan SOP dan Tupoksinya masing-masing dan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja;
2. Masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Parigi dalam melaksanakan tugas adalah :
   b. Jumlah Aparatur di Pengadilan Negeri Parigi masih sangat kurang, perlu penambahan personil agar penataan / pembagian tugas dapat lebih terorganisir dan teratur;
   c. Pengadilan Negeri Parigi masih kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tupoksi, diantaranya : Komputer/P.C, Laptop, Printer, AC, Jaringan PABX, Rumah Dinas, Jalan Kompleks, dll.
3. Dalam menangani perkara, Pengadilan Negeri Parigi sedang berupaya untuk mengoptimalkan transparansi penanganan perkara dengan memanfaatkan Teknologi Informasi seperti CTS dan upload putusan, agar masyarakat umum dapat mengakses informasi perkara secara *real time*;
4. Pengadilan Negeri Parigi masih menata sarana dan prasarana untuk memberikan layanan terbaik bagi masyaratkat untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Sekarang ini Pengadilan Negeri Parigi telah tersedia meja informasi, meja pengaduan dan papan informasi perkara serta layanan online publikasi perkara (CTS dan Upload putusan). Layanan publik tersebut belum maksimal karena keterbatasan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan laporan kajian hasil kerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020 di atas, Pengadilan Negeri Parigi merekomendasikan :

1. Perlunya upaya peningkatkan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan

yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna menghasilkan tenaga dan profesional dalam bidangnya

2. Perlunya penambahan pegawai karena pegawai yang ada saat ini masih belum memadai

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pada Tahun 2020, Kami sampaikan. semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya dalam pembangunan di bidang Hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Parigi Khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI
NOMOR W21-U7/ 22 /KP.04.6/ 01 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

Menimbang :

a. bahwa untuk kesempurnaan, percepatan dan akurasi data dalam Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu Penunjukan Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020;

b. bahwa selain pertimbangan pada huruf a di atas, dengan dibentuknya Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020, diharapkan agar penyelesaian penyusunan laporan dapat diselesaikan tepat waktu;

c. bahwa yang ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, jo Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku 1 tentang pedoman pelaksana tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, administrasi perbendaharaan, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung R.I, Prototype gedung pengadilan dan rumah dinas dan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung R.I.

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2020.**

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020;

KEDUA : Kepada yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan dan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020 dalam lampiran surat keputusan ini, agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 04 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, SH., M.Hum.

Tembusan :
1. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI
NOMOR : W.21-U7/ /KP.04.6/ 01 /2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, SH., M.Hum	KETUA	PEMBINA
2	RAPIUDDIN, SH., MH.	PANITERA	KOORDINATOR KEPANITERAAN
3	TAMRAN, SH.	SEKRETARIS	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
4	RIYA WAHYUNINGTYAS, SH	KASUBBAG PTIP	PENANGGUNG JAWAB PENYUSUN DOKUMEN
5	MAROLOP SINAGA, SH	PANMUD PIDANA	PENYAJI DATA PIDANA
6	ADY YAYAN SASWANTO, SH	PANMUD HUKUM	PENYAJI DATA HUKUM
7	ROSMAIDA GULTOM	PANMUD PERDATA	PENYAJI DATA PERDATA
8	MUNAFRI, SE	KASUBBAG KOTL	PENYAJI DATA KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
9	FENNY KALYANA CENDANA, SE	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PENYAJI DATA UMUM DAN KEUANGAN
10	VISUDDHATMA SANKARA, S.KOM.	STAF PTIP / ANALIS PERENCANA	OPERATOR

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 04 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, SH., M.Hum.